

## Komisi Pemilihan Umum

# Pedoman Pengisian Kuesioner Evaluasi Pemilu 2024

### Pendahuluan

Salah satu tugas dan kewajiban KPU yang diamanatkan di dalam undang-undang pemilu adalah melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Evaluasi secara umum diartikan sebagai kegiatan untuk mengkaji sebuah program atau kegiatan yang dimaksudkan menemukan permasalahan dan kendala yang dihadapi, mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor yang menyebabkannya serta menilai capaian dari program tersebut. Evaluasi pemilu itu sendiri merupakan kegiatan untuk mereview dan menilai pelaksanaan tahapan pemilu guna mengetahui permasalahan, kendala, hambatan dalam penyelenggaraan pemilu, serta mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor pendukungnya, sehingga akan dapat menghasilkan kesimpulan dan saran perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Menindaklanjuti penyelenggaraan tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 yang selesai dilaksanakan, KPU menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan tahapan pemilu tersebut. Evaluasi ini mencakup penyelenggaraan tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu (yang mencakup dukungan fasilitasi penyelenggaraan tahapan dan

non-tahapan pemilu), serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja KPU dalam menyelenggarakan tahapan pemilu. Adapun ruang lingkup obyek evaluasi mencakup penyelenggaraan pemilu oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Adhoc.

Penyelenggaraan evaluasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu yang tersedia, mengingat bahwa hingga saat ini masih terdapat tahapan pemilu berupa penetapan hasil pemilu secara nasional yang belum selesai karena masih adanya perselisihan hasil pemilu yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, juga sedang menyelenggarakan tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak.

Berbagai tantangan tersebut di atas mendorong KPU untuk memilih dan menentukan pendekatan dalam penyelenggaraan evaluasi yang diharapkan tidak akan terlalu membebani pelaksanaan tugas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak, namun masih dapat menghasilkan capaian hasil evaluasi yang akurat dan akuntabel. Oleh karenanya, evaluasi ini dilaksanakan dengan menggunakan instrumen survey, dimana kuesioner survey diisi oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Data yang diperoleh dari survey ini akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan potret penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya.

Evaluasi diharapkan dapat berguna untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak (eksplanasi) sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati, mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya, mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan, mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency, mengetahui dampak dari kebijakan, sebagai kontrol terhadap kebijakan (mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat

penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya), serta menghasilkan rekomendasi.

## Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

## Tujuan

1. **Menilai penyelenggaraan pemilu tahun 2024:** baik dari aspek tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu di seluruh tingkatan.
2. **Membangun model dan standar evaluasi pemilu:** yang mencakup ruang lingkup, pendekatan, metodologi, dan standar capaian hasil evaluasi yang akan dapat diadopsi menjadi model dan standar evaluasi pemilu dan pemilihan di masa mendatang.

## Manfaat

Evaluasi ini bermanfaat untuk menemukenali permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya. Saran perbaikan ini nantinya akan dapat dipergunakan oleh internal KPU, dan juga dapat disampaikan kepada stakeholder pemilu, yang mencakup pemerintah, DPR dan pihak-pihak lainnya.

Di samping itu, melalui evaluasi ini, akan diperoleh model dan standar yang akan dapat dipergunakan KPU untuk melakukan evaluasi pemilu dan pemilihan di masa mendatang.

## Desain Evaluasi Pemilu 2024

### 1. Kriteria Evaluasi

Evaluasi pemilu ini dirancang berdasarkan atas beberapa kriteria mengacu kepada pendapat Frohock, Poister, dan Edwards Schuman kriteria berikut:

- a. Kesesuaian penyelenggaraan pemilu dengan tujuan pemilu.
- b. Efektivitas, kecukupan dan kesesuaian.
- c. Keadilan, optimalitas, dan kepentingan publik.

### 2. Prinsip Evaluasi

Evaluasi pemilu ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Evidence based evaluation
- b. Comprehensiveness
- c. Partisipatif

### 3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 mencakup 3 dimensi dan beberapa indikator.

Dimensi evaluasi:

- a. Dimensi Tahapan & Non-Tahapan Pemilu yang mencakup evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu mulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan hasil pemilu, serta non-tahapan pemilu yang mencakup pengadaan logistik pemilu dan pelaporan dana kampanye pemilu.
- b. Dimensi Kelembagaan yang mencakup penyediaan fasilitasi dukungan mulai dari administrasi, anggaran, SDM, maupun sarana.
- c. Dimensi Eksternalitas yang mencakup faktor politik, hukum, sosial dan lain-lain yang terjadi di luar KPU namun mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024.

## Metode Evaluasi

Evaluasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 ini menggunakan metode campuran (mixed-methods) antara metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dipergunakan untuk menggali data, mengkaji dan mengukur capaian pelaksanaan tahapan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 secara kuantitatif, termasuk untuk menemukan pengaruh dan dampak antar variabel evaluasi. Sedangkan metode kualitatif dipergunakan untuk mendapatkan informasi dan menjelaskan faktor-faktor penyebab kegagalan dan faktor pendukung keberhasilan capaian dalam penyelenggaraan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024. Penggunaan metode campuran ini diharapkan akan dapat menghasilkan potret yang utuh dan komprehensif dalam menilai penyelenggaraan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 baik di tingkat pusat maupun daerah.

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam evaluasi ini terdiri atas: data primer yakni data yang diperoleh dari informan yang mencakup komisioner KPU/KPU Prov/Kab/Kota dan sekretariat KPU/KPU Prov/Kab/Kota, dan stakeholder pemilu lainnya; dan data sekunder yang terdiri atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu, dokumen administrasi dan keuangan. Di samping itu, data sekunder ini juga mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan non-hukum.

Penggalan data (primer maupun sekunder) dalam evaluasi ini Responden dalam evaluasi menggunakan metode survey yang melibatkan responden KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Responden ini tidak mewakili individu komisioner maupun individu pegawai sekretariat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, namun mewakili lembaga. Dengan demikian, KPU diposisikan sebagai satu responden yang mewakili lembaga KPU, KPU Provinsi terdiri atas 38 responden yang mewakili masing-masing KPU Provinsi, sedangkan responden KPU Kab/Kota terdiri atas 514 responden yang mewakili 514 kab/kota di Indonesia.

## Jenis Kuesioner

Kuesioner dalam evaluasi pemilu 2024 terdiri atas:

1. Kuesioner untuk KPU.
2. Kuesioner untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

## Metode Pengisian Kuesioner

### A. Kuesioner untuk KPU

Kuesioner untuk KPU diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KPU sebagai sebuah lembaga merupakan 1 responden dalam survey evaluasi pemilu ini.
2. Ketua KPU menugaskan kepada Sekretaris Jenderal KPU untuk memimpin proses pengisian kuesioner evaluasi.
3. Sekretaris Jenderal KPU menugaskan kepada Bagian Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan melalui Deputi dan Kepala Biro untuk menjadi koordinator pengisian kuesioner evaluasi.
4. Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagai koordinator pengisian kuesioner mendistribusikan dokumen kuesioner (lampiran 1) kepada masing-masing unit kerja (biro, pusat, irwil, dan bagian) untuk dipelajari.
5. Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagai koordinator pengisian kuesioner menyelenggarakan rapat koordinasi tahap 1 dengan menghadirkan masing-masing unit kerja (biro, pusat, irwil, dan bagian) untuk menjelaskan tata cara pengisian kuesioner, penyediaan dokumen pendukung, dan waktu pengisian kuesioner.
6. Masing-masing unit kerja (kedeputian, biro, dan bagian) menyiapkan dokumen pendukung sesuai kebutuhan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam rapat koordinasi. Dokumen pendukung didigitalisasi, kemudian diupload ke dalam cloud-server yang disepakati (atau cloud-server resmi lembaga), misalnya google-drive, icloud, dan lain-lain.
7. Bagian Monev KPU sebagai koordinator pengisian kuesioner menyelenggarakan rapat koordinasi tahap 2 dengan menghadirkan masing-masing unit kerja (biro, pusat, irwil, dan bagian) untuk melakukan koordinasi pengisian kuesioner dan upload dokumen pendukung.

Pengisian jawaban kuesioner dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pengisian jawaban kuesioner dilakukan secara terkoordinasi, terutama dalam hal pertanyaan dalam kuesioner berkaitan dengan tugas yang dilakukan secara lintas biro, bagian maupun lintas kedeputian.
  - b. Pengisian jawaban kuesioner dilakukan melalui G-form yang tersedia.
  - c. Pengisian jawaban terkait dengan dokumen pendukung dilakukan dengan mencantumkan link cloud-server yang dipergunakan untuk menyimpan dokumen pendukung (bukan dengan meng-attach dokumen digital).
8. Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagai koordinator pengisian kuesioner melaporkan hasil pelaksanaan pengisian kuesioner evaluasi kepada Sekjen KPU.
  9. Sekjen KPU mereview hasil pengisian kuesioner evaluasi, dan menandatangani pernyataan "*clearance*" yang tercantum dalam lampiran 2, dan melaporkan hasil pengisian kuesioner evaluasi kepada Ketua KPU.

#### **B. Kuesioner untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota**

Kuesioner untuk KPU Provinsi/Kab/Kota diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/Kab/Kota sebagai sebuah lembaga merupakan 1 responden dalam survey evaluasi Pemilu ini.
2. Ketua KPU Provinsi/Kab/Kota menugaskan kepada Sekretaris KPU Provinsi/Kab/Kota untuk memimpin proses pengisian kuesioner evaluasi.
3. Sekretaris KPU Provinsi/Kab/Kota menugaskan kepada Bagian/Subbag Monev KPU untuk menjadi koordinator pengisian kuesioner evaluasi.
4. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi/Subbag Perencanaan KPU Provinsi/Kab/Kota sebagai koordinator pengisian kuesioner mendistribusikan dokumen kuesioner (lampiran 3) kepada masing-masing Bagian/Subbag untuk dipelajari.

5. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi/Subbag Perencanaan KPU Provinsi/Kab/Kota sebagai koordinator pengisian kuesioner menyelenggarakan rapat koordinasi tahap 1 dengan menghadirkan masing-masing Bagian/Subbag untuk menjelaskan tata cara pengisian kuesioner, penyediaan dokumen pendukung, dan waktu pengisian kuesioner.
6. Masing-masing unit kerja menyiapkan dokumen pendukung sesuai kebutuhan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam rapat koordinasi. Dokumen pendukung didigitalisasi, kemudian diupload ke dalam cloud-server yang disepakati (atau *cloud-server* resmi lembaga), misalnya *google-drive*, *icloud*, dan lain-lain.
7. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi/Subbag KPU Provinsi/Kab/Kota sebagai koordinator pengisian kuesioner menyelenggarakan rapat koordinasi tahap 2 dengan menghadirkan masing-masing Bagian/Subbag untuk melakukan koordinasi pengisian kuesioner dan upload dokumen pendukung. Pengisian jawaban kuesioner dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Pengisian jawaban kuesioner dilakukan secara terkoordinasi, terutama dalam hal pertanyaan dalam kuesioner berkaitan dengan tugas yang dilakukan secara lintas biro, bagian maupun lintas kedeputian.
  - b. Pengisian jawaban kuesioner dilakukan melalui G-form yang tersedia.
  - c. Pengisian jawaban terkait dengan dokumen pendukung dilakukan dengan mencantumkan link cloud-server yang dipergunakan untuk menyimpan dokumen pendukung (bukan dengan meng-attach dokumen digital).
8. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi/Subbag KPU Provinsi/Kab/Kota sebagai koordinator pengisian kuesioner melaporkan hasil pelaksanaan pengisian kuesioner evaluasi kepada Sekretaris Jenderal KPU.
9. Sekretaris KPU Provinsi/Kab/Kota mereview hasil pengisian kuesioner evaluasi, dan menandatangani pernyataan "*clearance*" yang tercantum dalam Lampiran 4, dan melaporkan hasil pengisian kuesioner evaluasi kepada Ketua KPU Provinsi/Kab/Kota.

## Batas Waktu Pengisian Kuesioner

Pengisian kuesioner evaluasi oleh KPU, KPU Provinsi/Kab/Kota dilakukan paling lambat pada tanggal 26 Agustus 2024.

## Penutup

Hasil pengisian kuesioner evaluasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 akan diolah dan dianalisa oleh KPU dengan dibantu oleh Tim Pakar yang ditunjuk oleh KPU.

## Lampiran 1

INSTRUMEN EVALUASI KPU RI						
NO	DIMENSI	SUB-DIMENSI	INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	DOKUMEN
1	TAHAPAN	Pendaftaran Pemilih	kecukupan jadwal tahapan pada proses penyusunan DPT	Apakah jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih sudah cukup?		Laporan penyelenggaraan tahapan
2				Apabila tidak cukup, tahapan mana perlu ditambah waktunya?	Jawaban Singkat	
3			Persentase partisipasi masyarakat yang mengakses cekdptonline	Berapa jumlah akses masyarakat ke link cekdptonline? (Agregat data nasional, jumlah akses dibandingkan dengan jumlah pemilih)		Data e-coklit
4			kronologi perubahan SK tentang penetapan DPT	Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT?	Jawaban Singkat	Laporan penyelenggaraan tahapan
5			persentase antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk	Apakah jumlah Pantarlih sesuai dengan jumlah TPS yang terbentuk? (Agregat data nasional)		
6			jumlah persentase Pantarlih yang menggunakan alat bantu ecoklit dalam tahapan coklit	Berapa persen Pantarlih yang menggunakan ecoklit? (Agregat data nasional)		

7		Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	Apakah PKPU 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih sudah sesuai?		Laporan penyelenggaraan tahapan
8			Jika Kurang/tidak sesuai, apa masukan perbaikan PKPU untuk Pemilu Selanjutnya?	Jawaban Singkat	
9		kesesuaian Pedoman Teknis dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	Apakah SK KPU 27/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri mudah dipahami?		
10			Jika Kurang/tidak sesuai, apa masukan perbaikan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri untuk Pemilu Selanjutnya?	Jawaban Singkat	
11		Kesesuaian Pedoman Teknis dalam pelaksanaannya di KPU dan Badan Adhoc	Apakah SK KPU 55/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri sudah sesuai?		
12			Jika Kurang/tidak sesuai, apa masukan perbaikan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri untuk Pemilu Selanjutnya?	Jawaban Singkat	
13		Penyusunan dan Penetapan DPS	Apakah DPS ditetapkan sesuai jadwal?		Keputusan DPS
14			Jika tidak, apa penyebabnya?	Jawaban Singkat	
15			Berapa jumlah masukan masyarakat untuk perbaikan DPS?	Jawaban Singkat	Dokumen laporan masukan masyarakat
16			Berapa jumlah masukan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya?	Jawaban Singkat	Dokumen laporan masukan masyarakat

17			Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPS?	Jawaban Singkat		
18		Penetapan DPT	Apakah DPT ditetapkan sesuai jadwal?		Keputusan DPT	
19			Jika tidak, apa penyebabnya?	Jawaban Singkat		
20			Apakah terjadi kasus pelanggaran dalam pendaftaran pemilih?		Surat/dokumen dari Bawaslu terkait pelanggaran dalam pendaftaran pemilih	
21			Jika ya:			
			Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?			
			Berapa jumlah perbaikan daftar pemilih yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu?		Dokumen tindak lanjut putusan Bawaslu	
22			Berapa jumlah Pantarilih, PPS, PPK, KPU Kab/Kota yang mendapat sanksi?			
23	Penetapan Peserta Pemilu	Verifikasi Parpol	Apakah semua Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah lulus verifikasi administrasi, dilakukan verifikasi faktual?		Laporan penyelenggaraan tahapan	
24			Apabila tidak dilakukan verifikasi faktual, sebutkan alasan-alasannya?			
25		Layanan Helpdesk	Apakah dibentuk layanan Helpdesk untuk Partai Politik Calon Peserta Pemilu?			
26			Apabila tidak dibentuk layanan Helpdesk? sebutkan alasannya?			
27			Berapa jumlah bakal calon peserta pemilu yang mengakses layanan Helpdesk? (Agregat data nasional)	Jawaban Singkat		
28		Sipol	Apakah penggunaan Aplikasi Sipol membantu dalam proses tahapan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu?			
29			jika tidak membantu, sebutkan alasannya?	Jawaban Singkat		
30		Persoalan Hukum	Apakah terdapat sengketa pada saat pelaksanaan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu?			Surat/dokumen dari Bawaslu terkait pelanggaran
31			Jika ya:			
			Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi? (Agregat data nasional)	Jawaban Singkat		

				apa pokok masalah pelanggarannya?	Jawaban Singkat	
				Berapa jumlah sengketa yang terjadi? (Agregat data nasional)	Jawaban Singkat	
				Apa pokok masalah yang disengketakan?	Jawaban Singkat	
32		Partai lokal Aceh		Apakah terdapat masalah dalam tahapan pendaftaran partai politik lokal di Aceh?		Laporan KIP
33				Jika ya, apa saja permasalahannya?	Jawaban Singkat	
34	Daerah Pemilihan	PKPU		Apakah PKPU 6 Tahun 2022 dan Keputusan KPU 488 Tahun 2022 dapat diimplementasikan dengan baik dalam penataan dapil dan alokasi kursi?		laporan penyelenggaraan tahapan
35				Jika tidak, apa kendala yang anda hadapi?	Jawaban Singkat	
36		DP4		Apakah DP4 dan data wilayah akurat dan sinkron antara data dari daerah dengan di tingkat pusat?		
37				Jika tidak, bagaimana KPU mengatasinya?	Jawaban Singkat	
38		Prinsip Penentuan Dapil		Apakah 7 prinsip penentuan Dapil dapat dilaksanakan?		
39				Jika tidak:		
				Prinsip mana yang paling sulit untuk dipenuhi?		
				Dapil Kabupaten Mana yang tidak memenuhi prinsip penentuan dapil?	Jawaban Singkat	
40		Persoalan Hukum		Apakah terdapat sengketa proses dalam proses penentuan Dapil? (Agregat data nasional)		Surat/dokumen dari Bawaslu terkait pelanggaran
41				Jika ada, apa pokok masalah yang disengketakan?	Jawaban Singkat	
42				Bagaimana KPU menindaklanjuti putusan MK terkait Dapil?	Jawaban Singkat	
43	Pencalonan	Koordinasi		Apakah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tahapan pencalonan?		Laporan penyelenggaraan tahapan
				Dinas Pendidikan		
				Dinas Kesehatan		

			Kepolisian		
			Pengadilan		
44			Jika tidak, apa penyebabnya?	Jawaban Singkat	
45		PKPU	Apakah Peraturan KPU pencalonan dapat diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan tahapan pencalonan?		
46			Jika tidak, apa penyebabnya?	Jawaban Singkat	
47		DCS	Apakah Daftar Calon Sementara (DCS) ditetapkan oleh KPU tepat waktu?		
48			Jika tidak, apa penyebabnya?		
49		DCT	Apakah Daftar Calon Tetap (DCT) telah ditetapkan oleh KPU tepat waktu?		
50			Jika tidak, apa penyebabnya?		
51			Apakah ada Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara yang berdampak kepada Penggantian Calon Anggota DPR?		
52			Jika ada, apa kategori masukan masyarakat tersebut?		
53			Apakah setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, dilakukan perubahan terhadap Daftar Calon Tetap?		
54			Jika ya, sebutkan alasan perubahan DCT dimaksud		
55		Persoalan Hukum	Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa dalam tahapan Pencalonan?		
56			Jika ada:		
57			Jumlah judicial review atas PKPU? (Agregat data nasional)	Jawaban Singkat	
			Apa pokok masalah yang di JR ?	Jawaban Singkat	
			Jumlah pelanggaran pemilu (Agregat data nasional)	Jawaban Singkat	
			Apa bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi?	Jawaban Singkat	

			Jumlah sengketa proses pemilu (Agregat data nasional)	Jawaban Singkat	
			Apa pokok yang disengketakan?	Jawaban Singkat	
			Bagaimana KPU menindaklanjuti putusan MK terkait pencalonan presiden dan wakil presiden?	Jawaban Singkat	
58		Silon	Apakah bakal calon menggunakan aplikasi SILON ?		
59			Apa saja kendala yang muncul dalam penggunaan aplikasi SILON?	Jawaban Singkat	
60	Kampanye	PKPU	Apakah bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 serta perubahannya, dan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 serta perubahannya sudah ideal dengan kemampuan anggaran yang ada?		
61			jika tidak apa alasannya?	Jawaban Singkat	
62		SIDEKA	Apakah peserta pemilu memanfaatkan aplikasi SIKADEKA?		
63			Berapa persen peserta pemilu yang memanfaatkan aplikasi SIKADEKA?		
64			Apakah masyarakat dapat mengakses aplikasi SIKADEKA?		
65			Apa kendala yang muncul dalam penggunaan aplikasi SIKADEKA?	Jawaban Singkat	
66			Berapa persen peserta pemilu yang mematuhi ketentuan pelaporan dana kampanye?		
67		Audit dana kampanye	Apakah seluruh laporan dana kampanye diaudit oleh KAP?		
68			Apa kendala yang dihadapi KPU dalam memfasilitasi audit dana kampanye oleh KAP?	Jawaban Singkat	
69			Berapa jumlah peserta pemilu yang tidak melaporkan dana kampanye? (Agregat data nasional)		
70			Berapa jumlah temuan audit dana kampanye ?	Jawaban Singkat	

71				Apa saja permasalahan yang muncul dalam temuan audit dana kampanye?	Jawaban Singkat		
72			Persoalan Hukum	Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa TUN Pemilu dalam tahapan pencalonan?		Surat/dokumen dari Bawaslu terkait pelanggaran	
73				Jika ada:			
				Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?			
				apa pokok masalah pelanggarannya?	Jawaban Singkat		
				berapa jumlah sengketa yang terjadi?			
				Apa pokok masalah yang disengketakan?	Jawaban Singkat		
74		Pemungutan dan Penghitungan Suara	Jumlah TPS	Apakah terdapat TPS yang melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai dengan jadwal? (Agregat data nasional)			
59				Jika ada, berapa jumlahnya? (Agregat data nasional)	Jawaban Singkat		
60				Jika ada, apa penyebabnya?	Jawaban Singkat		
61				Keterpenuhan surat suara	Apakah terdapat TPS yang kekurangan surat suara?		
62					Apakah terdapat pemilih yang terhalangi haknya dalam memberikan suara di TPS?		
63					Jika ada, berapa jumlahnya? (Agregat data nasional)	Jawaban Singkat	
64					Jika ada, apa penyebabnya?	Jawaban Singkat	
65				Penghitungan suara	Apakah penghitungan suara di TPS dapat diselesaikan tepat waktu?		
66					Jika tidak, berapa jumlah TPS yang penyelesaian penghitungan suaranya melewati waktu? (Agregat data nasional)	Jawaban Singkat	
67					Apa penyebabnya?	Jawaban Singkat	
68				Persoalan hukum	Apakah terdapat kasus pelanggaran dalam proses penghitungan suara oleh KPPS?		
69					Jika ada, berapa jumlahnya? (Agregat data nasional)		

70			Jika ada, apa pokok masalah pelanggarannya?		
71		SIREKAP	Apakah penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS berjalan dengan baik?		
72			Jika tidak, berapa persen kasus terkait kegagalan penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS? (Agregat data nasional)		
73			Apa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS?		
74		Rekapitulasi suara	Apakah terdapat PPK yang melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?		Laporan kegiatan rekapitulasi suara
75			Jika ada:		
			berapa jumlahnya?		
			apa penyebabnya?	Jawaban Singkat	
76			Apakah terdapat KPU Kab/Kota yang melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?		
77			Jika ada:		
			jenis pemilu apa yang rekapitulasinya tidak sesuai jadwal?		
			apa penyebabnya?	Jawaban Singkat	
78			Apakah terdapat KPU Provinsi yang melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?		
79			Jika ada:		
			jenis pemilu apa yang rekapitulasinya tidak sesuai jadwal?		
			apa penyebabnya?	Jawaban Singkat	
80			Apakah KPU melaksanakan rekapitulasi suara nasional sesuai dengan jadwal?		
81			Jika tidak:		
			jenis pemilu apa yang rekapitulasinya tidak sesuai jadwal?		
			apa penyebabnya?	Jawaban Singkat	

82		Sirekap	Apakah penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi berjalan dengan baik?			
83			Jika tidak, berapa persen kasus terkait kegagalan penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi? (Agregat data nasional)			
84			Apakah faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi?			
85			Apakah penyebab munculnya masalah dalam penayangan hasil rekapitulasi suara secara realtime melalui Sirekap?			
86		Persoalan Hukum	Apakah terdapat kasus pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi? (Agregat data nasional)			
87			Jika ada, apa pokok masalah pelanggarannya?			
88			Apakah terdapat sengketa dalam proses rekapitulasi suara oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi? (Agregat data nasional)			
89			Jika ada, apa pokok masalah yang disengketakan?			
90	Penetapan Hasil	Penetapan Hasil	Apakah tahapan penetapan hasil pemilu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?			
91			Jika tidak:			
			jenis pemilu apa yang penetapan hasilnya tidak sesuai jadwal?			
			apa kendala yang dihadapi dalam proses penetapan hasil pemilu?	Jawaban Singkat		
92			Berapa jumlah kasus sengketa (PHPU)?			
			Pilpres	Jawaban Singkat		
			Pemilu DPR	Jawaban Singkat		
		Pemilu DPRD Provinsi	Jawaban Singkat			

				Pemilu DPRD Kab/Kota	Jawaban Singkat	
				Pemilu DPD	Jawaban Singkat	
93				Apa saja pokok masalah yang disengketakan?	Jawaban Singkat	
94				Apakah terdapat kasus pelanggaran dan sengketa proses dalam proses penetapan hasil pemilu di nasiona/Provinsi/Kab/Kota?		Surat/dokumen dari Bawaslu terkait pelanggaran/sengketa
95				Jika ada:		
				Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?		
				apa pokok masalah pelanggarannya?	Jawaban Singkat	
				berapa jumlah sengketa yang terjadi?		
			Apa pokok masalah yang disengketakan?	Jawaban Singkat		
96				Apakah terdapat pemungutan suara ulang di wilayah anda?		Laporan kegiatan
97				Jika ada:		
				jenis pemilu apa?		
				berapa jumlah TPS yang melaksanakan PSU?		
98				Apakah terdapat rekapitulasi suara ulang di wilayah anda?		
99				Jika ada:		
				jenis pemilu apa?		
				berapa jumlah wilayah yang melaksanakan rekapaitulasi suara ulang?		
100	NON-TAHA PAN	Sosialisasi	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	Apakah ada sosialisasi yang secara khusus memberikan pemahaman tentang mekanisme pendaftaran pemilih ?		
101				Berapa jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sosialisasi mekanisme pendaftaran pemilih?		
102			Sosialisasi peserta pemilu	Apakah cukup tersedia bahan sosialisasi tentang Partai Politik Peserta Pemilu 2024?		
103				Apakah terdapat sosialisasi daftar profil calon anggota DPR/DPRD dan DPD?	Jawaban Singkat	

104			Apakah terdapat sosialisasi daftar calon Presiden dan Calon Wakil Presiden?		
105			Berapa jumlah masyarakat yang mengakses situs Silon?		
106			Apakah dilakukan sosialisasi tentang peraturan kampanye?		
107	Sosialisasi kampanye		Berapa jumlah peserta pemilu yang terpapar kegiatan sosialisasi peraturan kampanye?		
108			Apakah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara?		
109	Sosialisasi pungut hitung		Berapa jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sosialisasi tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara?		
110	Perencanaan sosialisasi		Dalam membuat rencana kegiatan sosialisasi, apakah anda merujuk kepada dokumen Renstra dan RKP?		
111			Apakah kegiatan yang dilakukan telah memenuhi Key Performance Indikator (KPI) sebagaimana disebutkan dalam renstra?		
112	Sasaran sosialisasi		Apakah dalam menyelenggarakan sosialisasi dilakukan koordinasi dengan stackholder terkait?		
113			Apakah sosialisasi dilakukan dengan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi?		
114			Apakah dalam melakukan sosialisasi sudah dipetakan kelompok sasaran yang dituju?		
115			Berapa persen jumlah ketercapaian sosialisasi berdasarkan kelompok sasaran?		
116	Anggaran		Apakah terdapat kecukupan anggaran dalam upaya mencapai kelompok sasaran yang sudah ditetapkan?		
117			Apakah ketersediaan alat bantu sosialisasi sudah memadai?		
118	Media sosialisasi		Berapa banyak jumlah media elektronik yang digunakan untuk sosialisasi?		
119			Berapa banyak jumlah media sosial yang digunakan untuk sosialisasi?		

120		Partisipasi masyarakat	Apakah tingkat partisipasi masyarakat yang hadir ke TPS sesuai dengan target yang ditetapkan?		
121			Berapa persen tingkat keabsahan surat suara pemilu?		
122			Apakah dilakukan survei terhadap tingkat kesadaran pemilih setelah dilakukan sosialisasi?		
123			Berapa banyak liputan media dalam menyebarkan informasi, berita, dan program edukasi pemilih?		
124			Berapa jumlah lembaga Pemerintah/BUMN/BUMD yang terlibat dalam melaksanakan sosialisasi?		
125			Berapa jumlah lembaga swasta/non pemerintah yang terlibat dalam melaksanakan sosialisasi?		
126			Berapa jumlah lembaga pendidikan yang terlibat dalam melaksanakan sosialisasi?		
127	Logistik Pemilu	PKPU	Apakah regulasi Logistik Pemilu tersebut sudah tersosialisasi dengan baik?		
128			Apakah jumlah kebutuhan logistik yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara? (data agregat nasional)		
129		Anggaran	Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa logistik pemilu?		
130			Apakah perencanaan anggaran yang tersedia pada DIPA mencukupi untuk pengelolaan logistik pemilu?		
131			Apakah jumlah pegawai yang mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa mencukupi untuk pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu? (data agregat nasional)		
132			Apakah ada pegawai yang tidak mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa melakukan aktifitas Pengadaan Barang dan Jasa?		
133			Apakah Jumlah Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk kebutuhan tahapan pengadaan Logistik Pemilu sesuai dengan		

			jumlah Pengadaan Barang dan Jasa setiap jenis logistik Pemilu?		
134			Berapa jumlah Kelompok Kerja untuk kebutuhan tahapan pengadaan Logistik Pemilu? (data agregat nasional)		
135			Apakah pengadaan Logistik Pemilu dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal?		
136			Jika tidak, apa penyebabnya?		
137			Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pemilu, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam pengadaan, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pemilu?		
138			Apakah dokumen persiapan pengadaan Logistik Pemilu dimaksud telah dilakukan review oleh APIP?		
139			Apakah terdapat dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawalan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia?		
140			Siapa saja stakeholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pemilu?		
141			Apakah terdapat kendala koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pengiriman dan distribusi logistik Pemilu?		
142			Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pemilu?		
143			Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pemilu ?		
144			Variabel apa yang menjadi dasar dalam pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik ?		
145			Apakah terdapat permasalahan hukum dalam proses pengadaan Logistik Pemilu?		
146			Apakah permasalahan hukum tersebut sudah ditindaklanjuti?		

147			Berapa persentase sanggahan yang ditindaklanjuti oleh Kelompok Kerja Pemilihan?	Jawaban Singkat	
148			Berapa persentase efisiensi anggaran Pengadaan Logistik Pemilu (membandingkan nilai kontrak dengan nilai HPS)?	Jawaban Singkat	
149			Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pemilu oleh PPK?		
150			Apakah dilakukan monitoring produksi di pabrik?		
151			Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengategorikan baik, rusak atau cacat?		
152			Apakah menggunakan sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota ?		
153			Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota?		
154			Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan? (data agregat nasional)		
155			Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu?		
156			Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pemilu setelah diterima dari pabrik?		
157			Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota dapat memenuhi standar pemeliharaan terhadap logistik Pemilu untuk menjaga kualitas Logistik Pemilu selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu? (agregat nasional)		
158			Apa saja kendala yang muncul dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilu?		
159		Hukum	Apakah petunjuk teknis sebagai acuan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum mudah dipahami?		

146			Apakah petunjuk teknis tersebut mudah diimplementasikan dalam menghadapi perselisihan sengketa hukum?		
147			Berapa total jumlah perkara hukum yang dihadapi di Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota? (agregat nasional)	Jawaban Singkat	
148			Berapa total jumlah perkara hukum yang dihadapi di PTUN dan/atau PTTUN? (agregat nasional)	Jawaban Singkat	
149			Berapa jumlah perkara hukum yang dihadapi di Mahkamah Agung? (agregat nasional)	Jawaban Singkat	
150			Berapa total jumlah perkara hukum yang dihadapi di DKPP? (agregat nasional)	Jawaban Singkat	
151			Berapa total jumlah perkara hukum yang dihadapi di Pengadilan Negeri? (agregat nasional)	Jawaban Singkat	
152			Berapa total jumlah perkara hukum yang dihadapi di Mahkamah Konstitusi? (agregat nasional)	Jawaban Singkat	
153			Apakah terdapat Putusan yang tidak dapat ditindak lanjuti? (agregat nasional)	Jawaban Singkat	
154			Jika ada:		
			Berapa total jumlah putusan yang tidak ditindaklanjuti? (agregat nasional)		
			Apa pokok masalah yang tidak dapat ditindaklanjuti?		
			Apakah terdapat kendala dalam menindaklanjuti Putusan tersebut? (agregat nasional)	Jawaban Singkat	
155			Apakah terdapat sengketa hukum baru setelah tindak lanjut putusan? (agregat nasional)		
156			Berapa jumlah perkara sengketa hukum baru setelah tindak lanjut putusan ? (agregat nasional)		
157			Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dikabulkan oleh Bawaslu? (agregat nasional)		
158			Apa saja faktor penyebab Bawaslu mengabulkan permohonan sengeketa ?		

159			Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dikabulkan oleh PTUN? (agregat nasional)		
160			Apa saja faktor penyebab PTUN mengabulkan permohonan sengketa ?		
161			Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dikabulkan MA? (agregat nasional)		
162			Apa saja faktor penyebab MA mengabulkan permohonan judicial review terhadap peraturan KPU ?		
163			Apakah semua putusan MA dilaksanakan oleh KPU ?		
164			Apa saja faktor penyebab putusan MA tidak dilaksanakan oleh KPU ?		
165			Berapa Jumlah Perkara Pelanggaran Etika yang dinyatakan tidak terbukti oleh DKPP ? (agregat nasional)		
166			Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri? (agregat nasional)		
167			Apa saja faktor penyebab Pengadilan negeri mengabulkan perkara ?		
168			Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dikabulkan MK? (agregat nasional)		
169			Apa saja jenis sengketa yang dikabulkan MK ? ( JR, PPHU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) ?		
170			Apa saja faktor penyebab MK mengabulkan permohonan sengketa ?		
171			Apakah semua putusan MK dilaksanakan oleh KPU ?		
172			Apa kendala dalam pelaksanaan putusan MK ?		
173			Apakah terdapat pedoman penyusunan produk hukum di KPU? (agregat nasional)		
174			Apakah pedoman penyusunan tersebut mudah dipahami?		
175			Apakah semua produk hukum yang dibentuk telah melalui tahap uji publik?		
176			Apakah semua produk hukum yang dibentuk telah melalui tahap FGD?		

177				Apakah semua produk hukum yang dibentuk telah melalui tahap RDP?		
178				Apakah ada rekomendasi RDP yang tidak dilaksanakan oleh KPU ?		
179				Apa saja faktor penyebab rekomendasi RDP tidak dilaksanakan oleh KPU ?		
180				Apakah semua produk hukum yang dibentuk telah melalui tahap harmonisasi?		
181				Apakah ada kendala/hambatan dalam proses pembentukan produk hukum?		
182				apakah produk hukum KPU terutama Peraturan KPU yang terkait dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan sudah sesuai dengan renstra KPU terutama visi dan misi KPU dibidang regulasi		
183				Berapa jumlah keputusan KPU yang digugat di PTUN?		
184	KELEMBAG AAN	Pembentukan KPU Provinsi/ Kab/Kota	Pembentukan KPU Provinsi/ Kab/Kota	Apakah Peraturan KPU tentang tata cara seleksi calon anggota KPU Prov/Kab/Kota dapat dilaksanakan?		
185				Jika tidak, pada aspek apa kelemahan dari peraturan tersebut?		
186				Apakah tahapan seleksi calon anggota KPU Provinsi/ Kab/Kota berjalan sesuai dengan ketentuan?		
187				Jika tidak, apa penyebabnya?		
188				Apakah pelantikan anggota KPU Prov/Kab/Kota berjalan sesuai jadwal?		
189				Jika tidak, apa penyebabnya?		
190				Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa dalam proses seleksi dan penetapan anggota KPU Prov/Kab/Kota?		
191				Jika ada:		
				Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?		
				apa pokok masalah pelanggarannya?	Jawaban Singkat	
				Berapa jumlah gugatan PTUN?		

			apa pokok masalah yang digugat?		
192		Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota	Apakah seluruh Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengikuti Orientasi Tugas ?		
193			Apakah Modul Ortug mudah dipahami?		
194	Pembentukan Badan Adhoc	Pembentukan Badan Adhoc	Apakah instrumen/aturan pembentukan Badan Adhoc mudah dilaksanakan?	Ya	
195			Apa kendala dalam pembentukan Badan Adhoc?	Jawaban Singkat	
196			Apakah materi dalam bimbingan teknis pada saat pembentukan dapat membantu?	Ya	
197			Apakah kendala dalam penyelenggaraa bimbingan teknis?	Jawaban Singkat	
198			Apakah satuan kerja membentuk helpdesk pembentukan Badan Adhoc?	Ya	
199			Apakah helpdesk pembentukan Badan Adhoc bekerja dengan baik?	Ya	
200			Apakah satuan kerja melakukan supervisi dan monitoring terhadap wilayah yang mengalami kendala dalam pembentukan?	Ya	
201		bimtek kepada Badan Adhoc	Apakah Modul Bimtek KPPS mudah dipahami?	Ya	
202			Apakah Modul Bimtek PPS mudah dipahami?	Ya	
203			Apakah Modul Bimtek PPLN mudah dipahami?	Ya	
204		penyaluran dana Pemilu 2024 kepada badan adhoc	Apakah penyaluran anggaran untuk badan adhoc Luar Negeri sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan?		
205			Apakah penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan?		
206			Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc?	Ya	

207		laporan pertanggungjawaban badan adhoc	Berapa jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?		
208			Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?		
209			Apakah format laporan pertanggungjawaban keuangan mudah dipahami oleh badan adhoc?		
210			Apa Kendala yang dihadapi dalam pembuatan pertanggungjawaban oleh badan adhoc?	Jawaban Singkat	
211			Berapa jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?		
212			Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?		
213		Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc (SITAB)	Apakah badan adhoc menggunakan aplikasi SITAB dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemilu 2024?		
214			Apakah aplikasi SITAB mempermudah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemilu 2024?		
215			Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki badan adhoc memadai dalam penggunaan aplikasi SITAB?		
216		Pembebanan atas akun belanja pada kegiatan tahapan Pemilu	Apakah akun belanja yang digunakan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota?		
217		SDM pengelolaan keuangan di badan adhoc	Apakah Metode pelaksanaan Bimtek pengelolaan keuangan badan adhoc secara berjenjang efektif dalam membangun pengetahuan dan keterampilan badan adhoc?		

218			Jika tidak, apa kendala yang anda hadapi?		
219			Berapa jumlah KPU Kabupaten/Kota dan badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Provinsi?		
220			Berapa jumlah badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Kabupaten/Kota?		
221			Apakah petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan badan adhoc dalam menyusun laporan pengelolaan keuangan?		
222		Keuangan Badan Adhoc Pemilu di Luar Negeri	Apakah aturan dibidang keuangan yang diterbitkan oleh Instansi terkait sudah cukup memadai untuk mengakomodir kebutuhan pengelolaan keuangan tahapan Pemilu di luar negeri?		
223			Kendala apa saja yang dihadapi dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pengeluaran yang memadai?	Jawaban Singkat	
224			Apakah Petunjuk Teknis yang telah diterbitkan dapat dipahami dan diimplementasikan oleh Sekretariat PPLN?	Jawaban Singkat	
225			Apakah Bimtek pengelolaan keuangan PPLN bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan PPLN untuk menyusun laporan pengelolaan keuangan?		
226		Laporan Keuangan KPU mendapatkan Opini WTP	Apakah Laporan Keuangan tingkat UAPA, UAPA Es-I, UAPPA-W, dan UAKPA telah disusun sesuai dengan:		
			Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		
			Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan		
			Kecukupan Pengungkapan didalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)		
			Sistem Pengendalian Intren yang memadai		
227			Apakah KPU telah menyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) tingkat lembaga (laporan konsolidasi minimal 30% dari jumlah satker) secara tepat waktu?		

228			Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK secara tepat waktu?		
229			Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan bimtek penyusunan laporan keuangan (semester, triwulan, dan tahunan)?		
230			Apa kendala yang dihadapi dalam menyusun laporan keuangan?	Jawaban Singkat	
231			Berapa jumlah opini WTP yang telah dicapai?	Jawaban Singkat	
232		PBJ	Berapa persen tingkat kelulusan pada pelaksanaan pelatihan PBJ?		
233			Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk seluruh satker di Indonesia?		
234			Berapa persen tingkat kelulusan pada pelaksanaan pelatihan PBJ?		
235			Apakah metode pembelajaran efektif untuk menunjang tingkat kelulusan?		
236			Apakah KPU sudah memiliki pedoman penatausahaan persediaan pemilu?		
237			Apakah pelaksanaan penatausahaan persediaan pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku?		
238			Apakah KPU telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilu?		
239			Apakah KPU telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor eksternal atas pelaporan Persediaan Pemilu?		
240			Apakah KPU sudah memiliki pedoman pemindahtanganan persediaan pemilu?		
241			Apakah pelaksanaan pemindahtanganan persediaan pemilu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?		
242			Apakah pemindahtanganan Persediaan Pemilu yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang (Tertib Administrasi) optimal?		

243			Apakah KPU sudah memiliki pedoman pemusnahan persediaan pemilu?		
244			Apakah pelaksanaan pemusnahan persediaan pemilu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?		
245			Apakah pemusnahan Persediaan Pemilu yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang (tertib administrasi) optimal?		
246			Apakah KPU sudah memiliki pedoman penghapusan persediaan pemilu?		
247			Apakah pelaksanaan penghapusan persediaan pemilu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?		
248			Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset?		
249			Apakah upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal?		
250			Apakah jumlah SDM pengelola persediaan Pemilu sudah cukup tersedia?		
251			Apakah SDM yang tersedia memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan persediaan Pemilu?		
252			Apakah telah tersedia cukup sarana prasarana (tanah, gedung, peralatan mesin, jaringan ATB dan Aset lainnya) yang memadai dalam penyelenggaraan Pemilu?		
253			Apakah pemenuhan sarana yang disediakan pemerintah pusat/pemerintah daerah mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilu?		
254			Apakah strategi pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu sudah optimal?		
255			Apa Strategi yang sudah dilakukan?		
			a. Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN (persediaan pemilu)		
			b. realisasi PNBK dari pengelolaan BMN (persediaan Pemilu)		

				c. Ketepatan waktu penyampaian Laporan (persediaan pemilu)		
				d. Asuransi BMN (sarpras penyelenggaraan Pemilu)		
				e. Tindak Lanjut persetujuan pengelolaan BMN (pemindahtanganan barang Persediaan pasca Pemilu)		
				f. Tindak Lanjut BMN rusak berat (tidak digunakan/usang)		
				g. BMN memiliki dokumen kepemilikan		
				h. penggunaan BMN sesuai ketentuan		
256				Apakah sosialisasi strategi pencapaian IPA telah dilaksanakan?		
257	Perencanaan	Perencanaan		Apakah unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2022?		
258				Apakah satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?		
259				Kalau iya, berapa kali satuan kerja anda melakukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?		
260				Berapa persen penyerapan DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?		
261				Apakah petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota?		
262				Apakah satuan kerja KPU memahami petunjuk teknis penggunaan anggaran?		
263				Apakah penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku?		
264				Apakah rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?		
265				Apa hambatan/kendala yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?		

266			Apakah unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2023?		
267			Apakah satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?		
268			Kalau iya, berapa kali satuan kerja anda melakukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?		
269			Berapa persen penyerapan DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?		
270			Apakah petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota?		
271			Apakah penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku?		
272			Apakah rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?		
273			Apa hambatan/kendala yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?		
274	Kerja sama	Kerja sama	Apakah tersedia pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)?		
275			Apakah pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami?		
276			Apakah terdapat hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut?		
277			Jika iya, jelaskan!		
278			Apakah ruang lingkup kerja sama dalam MOU dan PKS sudah terlaksana?		
279			Apakah tindaklanjut kerja sama yang dilaksanakan dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan?		
280			Apakah kerjasama yang telah dilakukan disertai dengan dokumen kerjasama (MOU, PKS, kontrak, Berita acara dan Juknis)		

281			Sebutkan kegiatan tindak lanjut kerjasama yang dilaksanakan dengan stakeholder!		
282			Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama yang telah disepakati?		
283			Apa saja hasil dari pelaksanaan kerjasama		
284			Apa dampak dari kegiatan kerjasama yang telah dilakukan?		
285			Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pemilu?		
286			Sebutkan Nama Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri dan Luar Negeri yang telah bekerjasama dengan disertai dengan dokumen kerjasama (MOU, PKS, kontrak, Berita acara dan Juknis)		
287			Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama antara KPU dengan Kementerian/Lembaga/Non Kementerian?		
288	Fasilitasi pemilu di luar negeri	Fasilitasi pemilu di luar negeri	sebutkan kegiatan fasilitasi dalam mendukung tahapan pemilu di luar negeri!		
289			Apa saja bentuk kegiatan fasilitasi dalam mendukung pelaksanaan pemilu di Luar Negeri?		
290			Sebutkan kegiatan fasilitasi dalam mendukung kegiatan non tahapan pemilu di luar negeri!		
291			Sebutkan kendala yang dihadapi dalam memfasilitasi tahapan pemilu di luar negeri!		
292			Apa saja hasil dari fasilitasi tahapan pemilu di luar negeri?		
293			Apa dampak dari fasilitasi tahapan pemilu di luar negeri?		
294	SOP	SOP	Apakah tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur di setiap Unit kerja?		
295			Apakah Standar Operasional Prosedur yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan?		

296			Berapa Jumlah SOP yang telah disusun dan ditetapkan?		
297			Apa saja kendala dalam penyusunan SOP?		
298			Apakah SOP tersebut telah diimplementasikan?		
299			Apa saja kendala dalam pengimplementasian SOP?		
300			Apakah dilakukan Reviu dan Evaluasi SOP setiap tahun?		
301			Apa dampak SOP yang telah disusun terhadap Peningkatan kinerja?		
302	Monev	Monev	Apakah satker melaporkan secara berkala capaian output program dan kegiatan melalui aplikasi Monev/SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas secara tepat waktu?		
303			Apa kesulitan/kendala dalam menggunakan aplikasi Monev/SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas?		
304			Apa kendala dalam membuat laporan Monev (capaian output) secara berkala?		
305			Apakah satker memiliki SDM yang bersertifikasi?		
306			Apakah KPU secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terkait realisasi capaian output?		
307			Apakah ada tindaklanjut dari hasil evaluasi capaian output pada unit kerja?		
308			berapa unit kerja yang menindaklanjuti hasil evaluasi capaian output?	Jawaban Singkat	
309			Bagaimana cara menindaklanjuti hasil evaluasi capaian output?		
310			Berapa nilai kinerja anggaran KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2022?	Jawaban Singkat	
311			Berapa nilai kinerja anggaran KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2023?	Jawaban Singkat	
312	Laporan	LKjIP	Apakah LKjIP disusun tepat waktu ?		
313			Apakah LKjIP disusun sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 ?		

314			Apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan?		
315			Apakah LKJIP telah mendukung dalam penerapan good governance?		
316			Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan?		
317			Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan aplikasi e-SAKIP Reviu?		
318			Apakah penilaian LKJIP mencapai target tahunan yang telah ditetapkan?		
319			Apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi(e-Monev Bappenas dan SMART DJA)?		
320			Apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan?		
321	Reforma si Birkokra si	Reformasi Birkokrasi	Berapa indeks RB tahun 2022?	Jawaban Singkat	
322			Berapa indeks RB tahun 2023 ?	Jawaban Singkat	
323			Apa catatan terhadap hasil evaluasi Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2023?	Jawaban Singkat	
324			Apa rekomendasi terhadap hasil evaluasi Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2023?	Jawaban Singkat	
325			Jika iya, apakah catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi KPU tahun 2023 telah ditindaklanjuti?	Jawaban Singkat	
326			Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ?		
327			Apakah dampak pelaksanaan RB terhadap organisasi?		
328			Adakah kendala dalam pelaksanaan RB ?		
329			Apakah satker telah membentuk tim Reformasi Birokrasi?		

330			Apakah pembentukan Tim RB membantu mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU?		
331			Apakah Rencana Aksi RB General sesuai dengan juknis Kemenpan RB Nomor 182/2024 ?		
332	SOTK	SOTK	Apakah SOTK sudah sesuai kebutuhan?		
333			Apakah terdapat duplikasi terhadap tugas dan fungsi dalam struktur organisasi ?		
334			Apakah SOTK telah mewujudkan keberimbangan beban kerja antar unit kerja?		
335			Berapa persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi?		
336			Apakah penyederhanaan struktur organisasi meningkatkan kinerja?		
337			Apa dampak pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi terhadap pelaksanaan tugas?		
338			Berapa Nilai Komposit terhadap struktur dan proses organisasi dalam Evaluasi Kelembagaan sesuai Permenpan 20/2018?		
339			Apakah evaluasi kelembagaan sudah dilaksanakan berdasarkan pedoman evaluasi kelembagaan sesuai permenpanrb 20/2018?		
340			Apakah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di KPU ?		
341			Apakah ada Rekomendasi hasil Evaluasi Pelayanan Publik di KPU?		
342			Apakah Rekomendasi sudah ditindaklanjuti?		
343			Berapa Nilai Capaian Indeks Pelayanan Publik KPU? (Skala 1-5)		
344			Apakah setiap Unit Kerja di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik?		
345			Apakah terdapat Rekomendasi pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)?		

346			Apakah Rekomendasi sudah ditindaklanjuti?		
347			Berapa Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)? (Pertanyaan terbuka)		
348		Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait	Apakah (MoU dan PKS) telah dilakukan reviu oleh APIP?		
349		Pelaksanaan PBJ	Apakah pelaksanaan E-Catalog Nasional telah dilakukan probity Audit oleh APIP?		
350		Kesamaan spesifikasi dan kecukupan logistik Pemilu	Apakah logistik yang dikontrakkan telah sesuai dengan kebutuhan?		
351			Apakah Spesifikasi logistik yang diterima telah sesuai dengan kontrak?		
352		Laporan Keuangan KPU mendapatkan Opini WTP	Apakah Laporan Keuangan setiap Semester dilakukan Reviu oleh Inspektorat Utama KPU?		
353			Apakah Laporan PIPK telah dilakukan Reviu oleh Inspektorat Utama KPU?		
354			Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk Satker KPU Kabupaten/Kota?		
355		jumlah dan jenis sistem informasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses tahapan pemilu	Apa saja Sistem Informasi KPU yang belum tersedia?	Jawaban Singkat	
356		Keamanan siber pada Sistem Informasi KPU selama tahapan Pemilu	Apa saja bentuk serangan siber pada tahapan Pemilu?	Jawaban Singkat	
357			Apa saja yang sudah dilaksanakan dalam mitigasi serangan siber?	Jawaban Singkat	
358			Apa saja yang sudah dilaksanakan dalam menangani serangan siber?	Jawaban Singkat	

## Lampiran 2

### **PERNYATAAN KEBENARAN PENGISIAN KUESIONER EVALUASI PEMILU 2024**

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :

dengan ini menyatakan bahwa telah mengisi kuesioner Evaluasi Pemilu tahun 2024 dan mengisi dokumen pendukungnya dengan sebenar-benarnya.

....., ..... Agustus 2024

Nama Jelas

Jabatan

### Lampiran 3

INSTRUMEN EVALUASI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA						
NO	DIMENSI	SUB-DIMENSI	INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	DOKUMEN PENDUKUNG
1	TAHAPAN	Pendaftaran Pemilih	Jadwal tahapan pada proses penyusunan DPT	Apakah Pantarlih dibentuk tepat waktu?		Laporan kegiatan pembentukan Pantarlih
2				Jika tidak, apa permasalahannya?	Jawaban Singkat	

3			Apakah jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih sudah memadai?			
4			Jika tidak, tahapan mana perlu ditambah waktunya?	Jawaban Singkat		
5		persentase antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk	Apakah jumlah Pantarlih sesuai dengan jumlah TPS yang terbentuk?		SK pengangkatan Pantarlih	
6			Apa kendala dalam rekrutmen Pantarlih?	Jawaban Singkat		
7			Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	Apakah PKPU 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dapat dilaksanakan secara utuh?		
8				Jika tidak, apa permasalahannya?	Jawaban Singkat	
9				Apakah SK KPU 27/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri mudah dipahami?		
10				Berapa persen kesesuaian data bahan cokolit dengan hasil cokolit yang dilaksanakan Pantarlih?		Dokumen bahan cokolit dan hasil cokolit
11				Apakah Pantarlih bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?		
12				Jika tidak, apa bentuk penyimpangan yang sering terjadi?	Jawaban Singkat	Dokumen laporan hasil cokolit oleh pantarlih
13				Berapa persen Pantarlih yang menggunakan ecokolit?		Dokumen laporan hasil cokolit oleh pantarlih
				Persentase Pantarlih yang menggunakan alat bantu ecokolit dalam tahapan cokolit		

14			Penyusunan dan Penetapan DPS	Apakah DPS ditetapkan sesuai jadwal?		Keputusan DPS	
15				Jika tidak, apa penyebabnya?	Jawaban Singkat		
16			Masukan Masyarakat		Berapa jumlah masyarakat yang mengakses link cekdptonline?	Jawaban Singkat	Data dari situs cekdptonline masing-masing daerah
17					Berapa jumlah masukan masyarakat untuk perbaikan DPS dan DPT?	Jawaban Singkat	Dokumen laporan masukan masyarakat
18					Berapa jumlah masukan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya?	Jawaban Singkat	Dokumen laporan masukan masyarakat
19			Penyusunan dan Penetapan DPT		Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT?	Jawaban Singkat	
20					Apakah DPT ditetapkan sesuai jadwal?		Keputusan DPT
21					Jika tidak, apa penyebabnya?	Jawaban Singkat	
22			Permasalahan Hukum		Apakah terjadi kasus pelanggaran dalam pendaftaran pemilih?		Surat/dokumen dari Bawaslu terkait pelanggaran dalam pendaftaran pemilih
23					Jika ya:		
					Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?		
					Berapa jumlah perbaikan daftar pemilih yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu?		Dokumen tindak lanjut putusan Bawaslu
			Berapa jumlah Pantarlih, PPS, PPK, KPU Kab/Kota yang mendapat sanksi?				
24			Pendaftaran Peserta Pemilu	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah PKPU tentang Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu dapat dilaksanakan secara utuh?		
25					Jika tidak, apa permasalahannya?	Jawaban Singkat	

26			Verifikasi Calon Peserta Pemilu	Apakah semua Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah lulus verifikasi administrasi, dilakukan verifikasi faktual?		Dokumen laporan verifikasi
27				Apabila tidak dilakukan verifikasi faktual, sebutkan alasan-alasannya?	keterbatasan waktu untuk melaksanakan verifikasi faktual	
28				Apakah dilakukan koordinasi dengan Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada tingkatan masing-masing dalam pelaksanaan verifikasi faktual?		Laporan kegiatan
29				Jika tidak, jelaskan alasannya!		
30			Layanan Helpdesk	Apakah dibentuk layanan Helpdesk untuk Partai Politik Calon Peserta Pemilu?		SK, photo kegiatan, Laporan kegiatan helpdesk
31				Apabila tidak dibentuk layanan Helpdesk? sebutkan alasannya?		
32				Berapa jumlah bakal calon peserta pemilu yang mengakses layanan Helpdesk?		
33			Pemutahiran Keanggotan dan Pengurus Partai Politik	Apakah dilakukan verifikasi/pencermatan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota apabila Partai Politik Peserta Pemilu telah melakukan Pemutahiran Keanggotan dan Pengurus Partai Politik?		Laporan kegiatan
34				Jika tidak, jelaskan alasannya!		
35			Sipol	Apakah penggunaan Aplikasi Sipol membantu dalam proses tahapan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu?		Data penggunaan SIPOL
36				Jika tidak membantu, sebutkan alasannya?		
37			Permasalahan Hukum	Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa proses pada saat pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu?		Surat/dokumen dari Bawaslu terkait pelanggaran
38				Jika ya:		

				Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?	Jawaban Singkat	
				apa pokok masalah pelanggarannya?	Jawaban Singkat	
				berapa jumlah sengketa yang terjadi?	Jawaban Singkat	
				Apa pokok masalah yang disengketakan?	Jawaban Singkat	
39			Parpol Lokal Aceh	Apakah terdapat masalah dalam tahapan pendaftaran partai politik lokal di Aceh?		Surat/dokumen dari Bawaslu terkait pelanggaran
40				Jika ya, apa saja permasalahannya?	Jawaban Singkat	
41		Daerah Pemilihan	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah PKPU 6 Tahun 2022 dan Keputusan KPU 488 Tahun 2022 dapat diimplementasikan dengan baik dalam penataan dapil dan alokasi kursi?		Laporan tahapan penetapan dapil
42				Jika tidak:		
43				Apa kendala yang anda hadapi?	Jawaban Singkat	
44				Bagaimana KPU Kab/Kota mengatasinya?	Jawaban Singkat	
45			Kualitas Data kependudukan dan wilayah	Apakah data kependudukan dan data wilayah administrasi sebagai bahan pembuatan daerah pemilihan akurat?		
46				Jika tidak, bagaimana cara KPU Kab/Kota mengatasinya?	Jawaban Singkat	
47			Keterpenuhan Prinsip Penentuan Dapil	Apakah 7 prinsip penentuan Dapil dapat dilaksanakan?		
48				Jika tidak, prinsip mana yang paling sulit untuk dipenuhi?		
49			Permasalahan Hukum	Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa proses dalam proses penentuan Dapil?		Surat/dokumen dari Bawaslu terkait pelanggaran

50			Jika ada:		
			Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?	Jawaban Singkat	
			apa pokok masalah pelanggarannya?	Jawaban Singkat	
			berapa jumlah sengketa yang terjadi?	Jawaban Singkat	
			Apa pokok masalah yang disengketakan?	Jawaban Singkat	
51	Pencalonan	Koordinasi	Apakah KPU Prov/Kab/Kota melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tahapan pencalonan?		Laporan kegiatan
			Dinas Pendidikan		
			Dinas Kesehatan		
			Kepolisian		
			Pengadilan		
52			Jika tidak, apa penyebabnya?		
53		Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah Peraturan KPU pencalonan dapat diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan tahapan pencalonan?		
54			Jika tidak, apa penyebabnya?	Jawaban Singkat	
55		Penetapan DCS	Apakah Daftar Calon Sementara (DCS) ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tepat waktu?		SK KPU
56			Jika tidak, apa penyebabnya?	uraian/paragraf	
57		Masukan Masyarakat	Apakah ada Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara yang berdampak kepada Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota?		Laporan kegiatan

58			Jika ada, apa kategori masukan masyarakat tersebut?		
59		Penetapan DCT	Apakah Daftar Calon Tetap (DCT) telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tepat waktu?		SK KPU
60	Jika tidak, apa penyebabnya?				
61	Apakah setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan perubahan terhadap Daftar Calon Tetap?			SK KPU	
62	Jika ya, sebutkan alasan perubahan DCT dimaksud				
63	Permasalahan Hukum	Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa TUN Pemilu dalam tahapan pencalonan?		Surat/dokumen dari Bawaslu terkait pelanggaran	
64		Jika ada:			
		Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?			
		apa pokok masalah pelanggarannya?	Jawaban Singkat		
		berapa jumlah sengketa yang terjadi?			
	Apakah bakal calon menggunakan aplikasi SILON ?		Data dari SILON		
66		Apakah bakal calon menggunakan aplikasi SILON ?	Jawaban Singkat		
67	Kampanye	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 serta perubahannya, dan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 serta perubahannya sudah ideal dengan kemampuan anggaran yang ada?		Laporan tahapan kampanye

68				Jika tidak apa alasannya?		
69				Apakah dalam pelaksanaan kampanye, Peserta Pemilu sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?		
70				Jika tidak, apa alasannya?		
71				Apakah Peserta Pemilu memenuhi tanggung jawab untuk pembersihan Alat Peraga Kampanye yang dipasang dengan baik?		
72				Jika tidak, apa alasannya?		
73				Apakah batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri?		
74				Jika tidak, apa alasannya?		
75			SIDEKA	Apakah peserta pemilu memanfaatkan aplikasi SIKADEKA?		Data dari SIDEKA
76				Berapa persen peserta pemilu yang memanfaatkan aplikasi SIKADEKA?		
77				Apa kendala yang muncul dalam penggunaan aplikasi SIKADEKA?	Jawaban Singkat	
78			Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye	Berapa persen peserta pemilu yang mematuhi ketentuan pelaporan dana kampanye?		
79				Jika ada yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan dana kampanye:		
				Jumlah peserta pemilu yang tidak menyampaikan rekening khusus dana kampanye		

				Jumlah peserta pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)		
				Jumlah peserta pemilu yang tidak menyampaikan LPPDK		
80			Audit Dana Kampanye	Apakah seluruh laporan dana kampanye diaudit oleh KAP?		Laporan hasil audit KAP
81				Apakah ada temuan dari hasil audit oleh KAP?		
82				Jika ada: jumlah transaksi yang tidak dilengkapi dengan bukti transaksi		
				Jumlah sumbangan dari pihak yang dilarang		
				Jumlah sumbangan yang melebihi batas		
83				Apa kendala yang dihadapi KPU dalam memfasilitasi audit dana kampanye oleh KAP?	Jawaban Singkat	
84				Apa kendala yang dihadapi KAP dalam melaksanakan audit dana kampanye?		
85			Permasalahan Hukum	Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa terkait kampanye?		Surat/dokumen dari Bawaslu terkait pelanggaran/sengketa
86				Jika ada: Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?		
				apa pokok masalah pelanggarannya?	Jawaban Singkat	
				berapa jumlah sengketa yang terjadi?		
				Apa pokok masalah yang disengketakan?	Jawaban Singkat	
87	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya		Apakah terdapat KPPS memahami peraturan dan pedoman penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara?		

88			Jika ada, apa aspek yang tidak dipahami?	Jawaban Singkat	
89			Berapa jumlah TPS di wilayah anda?	Jawaban Singkat	SK KPU
90			Apakah terdapat TPS yang melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai dengan jadwal?		Laporan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara
91			Jika ada:	Jawaban Singkat	
			berapa jumlahnya?		
			apa penyebabnya?	Jawaban Singkat	
92			Apakah terdapat TPS yang kekurangan surat suara?		
93			Jika ada, berapa jumlahnya?		
94		Pelaksanaan Hak Pilih	Apakah terdapat pemilih yang terhalangi haknya dalam memberikan suara di TPS?		
95			Jika ada:		
			berapa jumlahnya?		
			apa penyebabnya?	Jawaban Singkat	
96		Ketepatan Waktu Penghitungan Suara	Apakah penghitungan suara di TPS dapat diselesaikan tepat waktu?		
97			Jika tidak:		
			berapa jumlah TPS yang penyelesaian penghitungan suaranya melewati waktu?		
			Apa penyebabnya?	Jawaban Singkat	
98		Permasalahan Hukum dalam Penghitungan Suara	Apakah terdapat kasus pelanggaran dan sengketa dalam proses penghitungan suara oleh KPPS?		Surat/dokumen dari Bawaslu terkait pelanggaran/sengketa

99				Jika ada:		
				Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?		
				apa pokok masalah pelanggarannya?	Jawaban Singkat	
				berapa jumlah sengketa yang terjadi?		
				Apa pokok masalah yang disengketakan?	Jawaban Singkat	
100			Penggunaan Sirekap oleh KPPS	Apakah penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS berjalan dengan baik?		Data SIREKAP
101				Jika tidak:		
				berapa persen kasus terkait kegagalan penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS?		
102				Apa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS?	Jawaban Singkat	
103			Ketepatan Waktu Rekapitulasi Suara	Apakah terdapat PPK yang melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?		Laporan kegiatan rekapitulasi suara
104				Jika ada:		
				berapa jumlahnya?		
				apa penyebabnya?	Jawaban Singkat	
105				Apakah KPU Kab/Kota melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?		
106				Jika tidak:		
				jenis pemilu apa yang rekapitulasinya tidak sesuai jadwal?		
				apa penyebabnya?	Jawaban Singkat	

107			Apakah KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?		
108			Jika tidak: jenis pemilu apa yang rekapitulasinya tidak sesuai jadwal? apa penyebabnya?	Jawaban Singkat	
109		Penggunaan Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota/Provinsi	Apakah penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi berjalan dengan baik?		Data SIREKAP
110			Jika tidak, berapa persen kasus terkait kegagalan penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi?		
111			Apa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi?	Jawaban Singkat	
112			Apa penyebab munculnya masalah dalam penayangan hasil rekapitulasi suara secara realtime melalui Sirekap?	Jawaban Singkat	
113		Permasalahan Hukum dalam Rekapitulasi Suara	Apakah terdapat kasus pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi?		Surat/dokumen dari Bawaslu terkait pelanggaran/sengketa
114			Jika ada: Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi? apa pokok masalah pelanggarannya? berapa jumlah sengketa yang terjadi? Apa pokok masalah yang disengketakan?	Jawaban Singkat Jawaban Singkat	
115	Penetapan Hasil	Ketepatan Waktu dalam	Apakah tahapan penetapan hasil pemilu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?		Laporan kegiatan penetapan hasil pemilu

116		Penetapan Hasil	Jika tidak: jenis pemilu apa yang penetapan hasilnya tidak sesuai jadwal? apa kendala yang dihadapi dalam proses penetapan hasil pemilu?	Jawaban Singkat	
117			Berapa jumlah kasus sengketa (PHPU) di wilayah anda? Pilpres Pemilu DPR Pemilu DPRD Provinsi Pemilu DPRD Kab/Kota Pemilu DPD		Data/informasi dari KPU RI
118		Permasalahan Hukum	Apakah terdapat kasus pelanggaran dalam proses penetapan hasil pemilu di Provinsi/Kab/Kota?		Surat/dokumen dari Bawaslu terkait pelanggaran/sengketa
119			Jika ada: Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi? apa pokok masalah pelanggarannya? berapa jumlah sengketa yang terjadi?	Jawaban Singkat	
			Apa pokok masalah yang disengketakan?	Jawaban Singkat	
120		PSU	Apakah terdapat pemungutan suara ulang di wilayah anda?		
121			Jika ada: jenis pemilu apa? berapa jumlah TPS yang melaksanakan PSU?		
122		Rekapitulasi ulang	Apakah terdapat rekapitulasi suara ulang di wilayah anda?		

123				Jika ada:		
				jenis pemilu apa?		
				berapa jumlah wilayah yang melaksanakan rekapitulasi suara ulang?		
124	NON-TAH APAN	Sosialisasi	Bentuk Kegiatan Sosialisasi	Apa saja bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kab/Kota untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme pendaftaran pemilih ?	Jawaban Singkat	Laporan kegiatan
125				Berapa jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sosialisasi mekanisme pendaftaran pemilih? (jumlah peserta kegiatan sosialisasi dibandingkan dengan jumlah pemilih di Provinsi/Kab/Kota)		
126				Apa saja bentuk kegiatan KPU Provinsi/Kab/Kota untuk sosialisasi:		
				Partai Politik Peserta Pemilu	Jawaban Singkat	
				Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden?	Jawaban Singkat	
				Calon anggota DPR/DPRD	Jawaban Singkat	
				Apakah jumlah bahan sosialisasi tentang Partai Politik Peserta Pemilu 2024 (dari anggaran APBN) cukup memadai?		
127				Jika tidak, bagian mana yang kurang?		
128				Berapa jumlah masyarakat yang mengakses situs Silon?	Jawaban Singkat	Data SILON
129			Pelaksanaan Sosialisasi	Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan sosialisasi tentang peraturan kampanye?		Laporan kegiatan
130				Berapa jumlah peserta pemilu yang terpapar kegiatan sosialisasi peraturan kampanye?		

131				Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara?		
132				Berapa jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sosialisasi tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara?		
133				Dalam membuat rencana kegiatan sosialisasi, apakah KPU Provinsi/Kab/Kota merujuk kepada dokumen Renstra dan RKP?		
134				Apakah kegiatan yang dilakukan telah memenuhi Key Performance Indikator (KPI) sebagaimana disebutkan dalam renstra?		
135				Apakah dalam menyelenggarakan sosialisasi, KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan koordinasi dengan stackholder terkait?		
136				Apakah sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota dilakukan dengan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi?		
137				Apakah dalam merencanakan sosialisasi, KPU Provinsi/Kab/Kota memetakan kelompok sasaran yang akan dituju?		
138				Berapa persen jumlah ketercapaian sosialisasi berdasarkan kelompok sasaran?	0 - 20%	
139			Anggaran Sosialisasi	Apakah terdapat kecukupan anggaran dalam upaya mencapai kelompok sasaran yang sudah ditetapkan?		
140			Sosialisasi kepada kelompok disabilitas	Apakah ketersediaan alat bantu sosialisasi bagi kelompok disabilitas sudah memadai?		
141			Media sosialisasi	Berapa banyak jumlah media elektronik yang digunakan untuk sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?		

142			Berapa banyak jumlah media sosial yang digunakan untuk sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?		
143		Partisipasi Pemilih	Apakah tingkat partisipasi masyarakat yang hadir ke TPS sesuai dengan target yang ditetapkan?		
144			Berapa persen tingkat keabsahan surat suara pemilu?		
145			Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan survei terhadap tingkat kesadaran pemilih setelah dilakukan sosialisasi?		
146		Partisipasi stakeholder	Berapa banyak liputan media dalam menyebarkan informasi, berita, dan program edukasi pemilih?		
147			Seberapa banyak keterlibatan Instansi Pemerintah Daerah/BUMD dalam melaksanakan sosialisasi?	Jawaban Singkat	
148			Seberapa banyak keterlibatan lembaga swasta/non pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi?	Jawaban Singkat	
149			Seberapa banyak keterlibatan lembaga pendidikan dalam melaksanakan sosialisasi?	Jawaban Singkat	
150	Logistik Pemilu	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah regulasi Logistik Pemilu dapat dilaksanakan dengan baik?		
151			Jika tidak, pada bagian mana dalam regulasi tersebut yang sulit diimplementasikan?	Jawaban Singkat	
152		Ketercukupan logistik Pemilu	Apakah jumlah kebutuhan logistik yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara di Provinsi/Kab/Kota?		
153			Jika tidak:		
			Apa saja jenis logistik pemilu yang kurang?	Jawaban Singkat	

			Berapa jumlah kekurangannya?	Jawaban Singkat	
			Mengapa kekurangan tersebut terjadi?	Jawaban Singkat	
154		Anggaran Logistik	Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa logistik pemilu?		
155			Apakah perencanaan anggaran yang tersedia pada DIPA mencukupi untuk pengelolaan logistik pemilu?		
156		SDM Pengadaan	Apakah jumlah pegawai yang mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Prov/Kab/Kota mencukupi untuk pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu?		
157			Apakah ada pegawai yang tidak mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Prov/Kab/Kota yang melakukan aktifitas Pengadaan Barang dan Jasa?		
158			Apakah Jumlah Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk kebutuhan tahapan pengadaan Logistik Pemilu sesuai dengan jumlah Pengadaan Barang dan Jasa setiap jenis logistik Pemilu?		
159		Pengadaan logistik	Apakah pengadaan Logistik Pemilu dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal?		
160			Jika tidak, apa penyebabnya?	Jawaban Singkat	
161			Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pemilu, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam pengadaan, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pemilu?		

162			Apakah dokumen persiapan pengadaan Logistik Pemilu dimaksud telah dilakukan review oleh APIP?		
163			Apakah terdapat dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawalan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia?		
164		Keterlibatan stakeholder	Siapa saja stakeholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pemilu?	Jawaban Singkat	
165			Apakah terdapat kendala koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pengiriman dan distribusi logistik Pemilu?		
166			Jika ada, apa saja kendalanya?	Jawaban Singkat	
167		Ketersediaan dokumen	Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pemilu?		
168			Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota?		
169			Variabel apa yang menjadi dasar dalam pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik ?	Jawaban Singkat	
170		Permasalahan hukum	Apakah terdapat permasalahan hukum dalam proses pengadaan Logistik Pemilu?		
171			Apakah permasalahan hukum tersebut sudah ditindaklanjuti?	Jawaban Singkat	
172			Berapa persentase sanggahan yang ditindaklanjuti oleh Kelompok Kerja Pemilihan?		

173			Berapa persentase efisiensi anggaran Pengadaan Logistik Pemilu (membandingkan nilai kontrak dengan nilai HPS)?		
174		Monitoring	Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pemilu oleh PPK KPU Prov/Kab/Kota?		
175			Apakah KPU Prov/Kab/Kota melakukan monitoring produksi di pabrik?		
176			Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengategorikan baik, rusak atau cacat?		
177			Apakah KPU Prov/Kab/Kota menggunakan sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota ?		
178			Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota?		
179			Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?		
180			Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu?		
181			Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pemilu setelah diterima dari pabrik?		
182			Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota dapat memenuhi standar pemeliharaan terhadap logistik Pemilu untuk menjaga kualitas Logistik Pemilu selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu?		
183				Apa saja kendala yang muncul dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilu?	Jawaban Singkat

184	Hukum	Peraturan Teknis	Apakah petunjuk teknis sebagai acuan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum mudah dipahami?		
185			Apakah petunjuk teknis tersebut mudah mengimplementasikan dalam menghadapi perselisihan sengketa hukum?		
186		Permasalahan hukum	Berapa jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota?		
			Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di PTUN dan/atau PTTUN?		
			Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di DKPP?		
			Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di Pengadilan Negeri?		
187		Apakah terdapat Putusan yang tidak dapat ditindak lanjuti oleh KPU Prov/Kab/Kota?			
188		Jika ada:			
		Berapa jumlah Putusan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Prov/Kab/Kota?			
		Apa saja kendala dalam menindaklanjuti Putusan tersebut oleh KPU Prov/Kab/Kota?	Jawaban Singkat		
189		Apakah terdapat sengketa hukum baru setelah tindak lanjut putusan oleh KPU Prov/Kab/Kota?			
190		Apakah terdapat perkara hukum yang dimenangkan oleh KPU Prov/Kab/Kota?			
191		Jika ada:			
		Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di Bawaslu Prov/Kab/Kota?			

				Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di PTUN?		
				Berapa Jumlah Perkara Gugatan yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di DKPP ?		
				Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di Pengadilan Negeri?		
192	KELEMBAGAAN	Pembekalan KPU Prov/Kab/Kota	Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota	Apakah seluruh Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengikuti Orientasi Tugas ?		
193				Apakah Modul Ortug mudah dipahami?		
194				Apa kekurangan/kelemahan yang anda rasakan dalam pelaksanaan Orientasi Tugas?	Jawaban Singkat	
195		Pembentukan Badan Adhoc	Peraturan Teknis	Apakah instrumen/aturan pembentukan Badan Adhoc mudah dilaksanakan?		
196				Jika tidak, pada bagian mana dalam regulasi tersebut yang sulit diimplementasikan?	Jawaban Singkat	
197				Apa kendala dalam pembentukan Badan Adhoc?	Jawaban Singkat	
198			Pembekalan Badan Adhoc	Apakah materi bimbingan teknis pembentukan Badan Adhoc dapat membantu penyelenggaraan pembentukan badan adhoc?		
199				Jika tidak, pada bagian mana dalam materi bimtek tersebut yang sulit dipahami?	Jawaban Singkat	
200				Apakah kendala dalam penyelenggaraa bimbingan teknis?	Jawaban Singkat	
201				Apakah Modul Bimtek KPPS mudah dipahami?		
202	Apakah Modul Bimtek PPS mudah dipahami?					
203	Jika tidak, pada bagian mana dalam materi bimtek tersebut yang sulit dipahami?	Jawaban Singkat				

204			Helpdesk	Apakah satuan kerja membentuk helpdesk pembentukan Badan Adhoc?		
205				Apakah helpdesk pembentukan Badan Adhoc bekerja dengan baik?		
206			Monev Pembentukan Badan Adhoc	Apakah satuan kerja melakukan supervisi dan monitoring terhadap wilayah yang mengalami kendala dalam pembentukan?		
207			keterpenuhan Badan Adhoc	Berapa Jumlah Kebutuhan Badan Adhoc ?		
				Jumlah Kebutuhan PPK	Jawaban Singkat	
				Jumlah Kebutuhan PPS	Jawaban Singkat	
				Jumlah Kebutuhan Pantarlih	Jawaban Singkat	
				Jumlah Kebutuhan KPPS	Jawaban Singkat	
208			Keterpenuhan jumlah Pendaftar Badan Adhoc	Berapa Jumlah Pendaftar Badan Adhoc ?		
				Jumlah Pendaftar untuk PPK	Jawaban Singkat	
				Jumlah Pendaftar untuk PPS	Jawaban Singkat	
				Jumlah Pendaftar untuk Pantarlih	Jawaban Singkat	
				Jumlah Pendaftar untuk KPPS	Jawaban Singkat	
209			Keterlambatan Penetapan Badan Adhoc	Apakah ada Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS yang terlambat melakukan penetapan Badan Adhoc?	Ya	
				Jumlah Kecamatan yang mengalami kendala dalam pembentukan PPK?		

			Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kendala dalam pembentukan PPS?		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kendala dalam pembentukan Panatrliah?		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kendala dalam pembentukan TPS?		
210		persentase Jumlah Badan Adhoc yang sesuai dengan persyaratan	Apakah ada Badan Adhoc yang mendaftar dengan persyaratan yang diberikan diskresi melalui jalur mandiri? (pemberian syarat calistung, dokumen surat kesehatan, domisili wilayah, dan pendaftaran non-mandiri yang tidak sesuai KTP - Monitoring jumlah pemenuhan dengan pemberian diskresi berupa ketentuan pendidikan, kesehatan, dan domisili maupun pendaftaran non-mandiri untuk melihat faktual kemampuan dalam pemenuhan administrasi yang telah ditetapkan)	Ya	
211			Jika ada:		
			berapa Jumlah anggota PPK yang mendaftar dengan diberikan diskresi pada persyaratan?	Jawaban Singkat	
			berapa Jumlah anggota PPS yang mendaftar dengan diberikan diskresi pada persyaratan?	Jawaban Singkat	
			berapa Jumlah anggota Pantarlih yang mendaftar dengan diberikan diskresi pada persyaratan?	Jawaban Singkat	
			berapa Jumlah anggota KPPS yang mendaftar dengan diberikan diskresi pada persyaratan?	Jawaban Singkat	
212		persentase Jumlah Badan Adhoc yang sesuai dengan persyaratan	Apakah ada Badan Adhoc yang mendaftar melalui jalur penunjukan/kerja sama? (pemenuhan kebutuhan dengan penggunaan penunjukan/kerja sama dikarenakan kekurangan jumlah pendaftar)	Ya	
213			Jika ada:		

			Berapa Jumlah anggota PPK yang direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama?	Jawaban Singkat	
			Berapa Jumlah anggota PPS yang direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama?	Jawaban Singkat	
			Berapa Jumlah anggota Pantarlih yang direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama?	Jawaban Singkat	
			Berapa Jumlah anggota KPPS yang direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama?	Jawaban Singkat	
214		persentase Jumlah Badan Adhoc yang sesuai dengan persyaratan	Berapa jumlah nilai rerata tes tertulis dalam seleksi PPK/PPS? (Nilai rerata dari seluruh jumlah nilai dibagi jumlah peserta - Monitoring jumlah daerah yang mengalami kekurangan dan jumlah anggota badan adhoc hasil dari penunjukan/kerja sama serta melihat rerata kompetensi obyektif badan adhoc		Pertanyaan Terbuka
			Rerata Nilai Tes Tertulis PPK pada pelaksanaan seleksi tertulis?	Jawaban Singkat	
			Rerata Nilai Tes Tertulis PPS pada pelaksanaan seleksi tertulis?	Jawaban Singkat	
215		persentase penggunaan CAT	Berapa jumlah Kecamatan yang melakukan tes berbasis komputer pada tahapan seleksi tertulis? (Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan CAT)		Pertanyaan Terbuka
			Jumlah Kecamatan yang melaksanakan CAT pada seleksi PPK?		
			Jumlah Kecamatan yang tidak melaksanakan CAT pada seleksi PPK?		
216			Alasan tidak melaksanakan CAT	Kendala Jaringan	
217			Berapa jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan tes berbasis komputer pada tahapan seleksi tertulis? (Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan CAT)		

				Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan CAT pada seleksi PPS?		
				Jumlah Desa/Kelurahan yang tidak melaksanakan CAT pada seleksi PPS?		
218				Alasan tidak melaksanakan CAT	Kendala Jaringan	
219			persentase calon yang sebelumnya pernah menjadi badan adhoc	Berapa persen jumlah Badan Adhoc yang pernah menjadi penyelenggara pemilu sebelumnya? (Jumlah anggota Badan Adhoc yang pernah menjadi penyelenggara sebelumnya)		
				Jumlah anggota PPK yang pernah menjadi Badan Adhoc?		
				Jumlah anggota PPS yang pernah menjadi Badan Adhoc?		
				Jumlah anggota Pantarlih yang pernah menjadi PPS Adhoc?		
				Jumlah anggota KPPS yang pernah menjadi Badan Adhoc?		
220			persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Berapa persen Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan laporan periodik bulanan)		
				Jumlah PPK/Kecamatan yang menyampaikan laporan tepat waktu?		
				Jumlah PPK/Kecamatan yang tidak menyampaikan laporan/dibantu pembuatan laporan?		
				Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan laporan tepat waktu?		
				Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang tidak menyampaikan laporan/dibantu pembuatan laporan?		

				Jumlah KPPS/TPS yang menyampaikan laporan tepat waktu?			
				Jumlah KPPS/TPS yang menyampaikan laporan terlambat?			
				Jumlah KPPS/TPS yang tidak menyampaikan laporan/dibantu pembuatan laporan?			
221			persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Berapa persen Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan evaluasi kinerja di akhir masa kerja)			
				Jumlah PPK/Kecamatan yang tidak menyampaikan evaluasi kinerja?			
				Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan evaluasi kinerja tepat akhir masa kerja?			
				Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang tidak menyampaikan evaluasi kinerja?			
				Jumlah KPPS/TPS yang menyampaikan evaluasi kinerja tepat akhir masa kerja?			
				Jumlah KPPS/TPS yang tidak menyampaikan evaluasi kinerja?			
222				persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Berapa persen jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang memiliki internal yang harmonis tanpa ada konflik yang diketahui dengan hitungan Kecamatan/Desa/Kelurahan bukan perorangan)		
					Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang memiliki hubungan kerja yang baik dalam internalnya?		

				Jumlah KPPS/TPS yang memiliki hubungan kerja yang baik dalam internalnya?		
223			persentase penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas bagi Badan Adhoc	Berapa persen jumlah PPK/Kecamatan mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?		
				Jumlah PPS/Desa/Kelurahan mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?		
				Jumlah KPPS/TPS mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?		
				Jumlah PPK/Kecamatan diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?		
				Jumlah PPS/Desa/Kelurahan diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?		
				Jumlah KPPS/TPS diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?		
224				Apakah ada PPK/PPS/KPPS yang diberhentikan secara tidak hormat?		
				Jika ada, berapa Jumlah PPK/Kecamatan yang diberhentikan secara tidak hormat?	Jawaban Singkat	
				Jika ada, berapa Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang diberhentikan secara tidak hormat?	Jawaban Singkat	
				Jika ada, berapa Jumlah KPPS/TPS yang diberhentikan secara tidak hormat?	Jawaban Singkat	
225				Apakah ada PAW pada Badan Adhoc yang dilakukan?		
				Jika ada, berapa Jumlah PAW anggota PPK yang diangkat?	Jawaban Singkat	
				Jika ada, berapa Jumlah PAW anggota PPS yang diangkat?	Jawaban Singkat	

			Jika ada, berapa Jumlah PAW anggota KPPS yang diangkat?	Jawaban Singkat	
226		penyaluran dana Pemilu 2024 kepada badan adhoc	Apakah penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan?		
227	Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc?				
228	Jika tidak, pada bagian mana dalam anggaran tersebut yang kurang mencukupi?		Jawaban Singkat		
229	laporan pertanggungjawaban badan adhoc		Berapa persen jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?		
230		Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?			
231		Apakah format laporan pertanggungjawaban keuangan mudah dipahami oleh badan adhoc?			
232		Apa Kendala yang dihadapi dalam pembuatan pertanggungjawaban oleh badan adhoc?	Jawaban Singkat		
233		Berapa persen jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?			
234		Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?			
235		Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi	Apakah badan adhoc menggunakan aplikasi SITAB dalam menyampaikan laporan		

				pertanggungjawaban keuangan Pemilu 2024?		
236			Pertanggungja waban Badan Adhoc (SITAB)	Apakah aplikasi SITAB mempermudah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemilu 2024?		
237				Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki badan adhoc memadai dalam penggunaan aplikasi SITAB?		
238			Pembebanan atas akun belanja pada kegiatan tahapan Pemilu	Apakah akun belanja yang digunakan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota?		
239			SDM pengelolaan keuangan di badan adhoc	Apakah Metode pelaksanaan Bimtek pengelolaan keuangan badan adhoc secara berjenjang efektif dalam membangun pengetahuan dan keterampilan badan adhoc?		
240				Jika tidak, apa kendala yang anda hadapi?	Jawaban Singkat	
241				Berapa persen jumlah KPU Kabupaten/Kota dan badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Provinsi?		
242				Berapa persen jumlah badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Kabupaten/Kota?		
243				Apakah petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan badan adhoc dalam menyusun laporan pengelolaan keuangan?		
244		Sistem informasi		Sistem informasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam	Apa saja Sistem Informasi KPU yang dipergunakan oleh KPU Prov/Kab/Kota?	Jawaban Singkat
245			Apa kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem informasi KPU oleh KPU Prov/Kab/Kota?		Jawaban Singkat	

246		proses tahapan pemilu	Apa saja Sistem Informasi KPU yang dipergunakan oleh KPU Prov/Kab/Kota?	Jawaban Singkat		
247	Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase KPU Provinsi, KPU Kab/Kota yang mempunyai ASN bersertifikat PBJ minimal 50% dalam satu Provinsi di wilayahnya	Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk seluruh satker di Indonesia?	Ya		
248			Berapa persen tingkat kelulusan pada pelaksanaan pelatihan PBJ?	0-20%		
249			Apakah metode pembelajaran efektif untuk menunjang tingkat kelulusan?	Ya		
250			Pelaksanaan PBJ	Apakah pelaksanaan E-Catalog Nasional telah dilakukan probity Audit oleh APIP?		
251			Kesamaan spesifikasi dan kecukupan logistik Pemilu	Apakah logistik yang dikontraskan telah sesuai dengan kebutuhan?		
252				Apakah Spesifikasi logistik yang diterima telah sesuai dengan kontrak?		
253			Laporan Keuangan	Laporan Keuangan KPU Provinsi/kab/Kota	Apakah Laporan Keuangan tingkat UAPA, UAPA Es-I, UAPPA-W, dan UAKPA telah disusun sesuai dengan:	
	Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)					
	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan					
	Kecukupan Pengungkapan didalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)					
	Sistem Pengendalian Intren yang memadai					
	Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK secara tepat waktu?					
254						
255			Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan bimtek			

				penyusunan laporan keuangan (semester, triwulan, dan tahunan)?		
256				Apa kendala yang dihadapi dalam menyusun laporan keuangan?	Jawaban Singkat	
257		BMN	penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan pemilu	Apakah pelaksanaan penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku?		
258	Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilu?					
259	Apakah pemindahtanganan dan pemusnahan Persediaan Pemilu yang dilaksanakan KPU Provinsi/Kab/Kota memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang (Tertib Administrasi) optimal?					
260	Pengawasan			Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset?		
261			Apakah upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal?			
262			SDM	Apakah jumlah SDM pengelola persediaan Pemilu KPU Provinsi/Kab/Kota sudah cukup tersedia?		
263				Apakah SDM KPU Provinsi/Kab/Kota yang tersedia memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan persediaan Pemilu?		
264				Sarana	Apakah telah tersedia cukup sarana prasarana (tanah, gedung, peralatan mesin, jaringan ATB dan Aset lainnya) yang	

				memadai dalam penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi/Kab/Kota?		
265				Apakah pemenuhan sarana yang disediakan pemerintah pusat/pemerintah daerah mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilu?		
266				Apakah strategi pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Provinsi/Kab/Kota sudah optimal?		
267				Apa Strategi yang sudah dilakukan?		Bentuk Checklist
				a. Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN (persediaan pemilu)		
				b. realisasi PNBPN dari pengelolaan BMN (persediaan Pemilu)		
				c. Ketepatan waktu penyampaian Laporan (persediaan pemilu)		
				d. Asuransi BMN (sarpras penyelenggaraan Pemilu)		
				e. Tindak Lanjut persetujuan pengelolaan BMN (pemindahtanganan barang Persediaan pasca Pemilu)		
				f. Tindak Lanjut BMN rusak berat (tidak digunakan/usang)		
				g. BMN memiliki dokumen kepemilikan		
				h. penggunaan BMN sesuai ketentuan		
268				Apakah sosialisasi strategi pencapaian IPA oleh KPU cukup membantu KPU Provinsi/Kab/Kota?		
269	Perencanaan	Anggaran 2022		Apakah unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2022?		
270				Apakah satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun		

				Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?		
271				Kalau iya, berapa kali satuan kerja anda melakukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?		
272				Berapa persen penyerapan DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?		
273				Apakah petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota?		
274				Apakah satuan kerja KPU memahami petunjuk teknis penggunaan anggaran?		
275				Apakah penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku?		
276				Apakah rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?		
277				Apa hambatan/kendala yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?		
278			Anggaran 2023	Apakah unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2023?		
279				Apakah satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?		
280				Kalau iya, berapa kali satuan kerja anda melakukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?		

281			Berapa persen penyerapan DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?		
282			Apakah petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota?		
283			Apakah penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku?		
284			Apakah rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?		
285			Apa hambatan/kendala yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?		
286	Kerja sama	Ketersediaan dokumen	Apakah tersedia pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)?		
287		Juknis	Apakah pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami?		
288			Apakah terdapat hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut?		
289			Jika iya, jelaskan!		
290		Pelaksanaan kerja sama	Apakah ruang lingkup kerja sama dalam MOU dan PKS sudah terlaksana?		
291			Apakah tindaklanjut kerja sama yang dilaksanakan dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan?		

292			Apakah kerjasama yang telah dilakukan disertai dengan dokumen kerjasama (MOU, PKS, kontrak, Berita acara dan Juknis)		
293			Sebutkan kegiatan tindaklanjut kerjasama yang dilaksanakan dengan stakeholder!		
294			Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama yang telah disepakati?		
295			Apa saja hasil dari pelaksanaan kerjasama		
296			Apa dampak dari kegiatan kerjasama yang telah dilakukan?		
297			Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pemilu?		
298			Sebutkan Nama Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang telah bekerjasama dengan disertai dengan dokumen kerjasama (MOU, PKS, kontrak, Berita acara dan Juknis)		
299			Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama antara KPU Prov/Kab/Kota dengan instansi pemerintah daerah?		
300			Apakah (MoU dan PKS) telah dilakukan reviu oleh APIP?		
301	Standard Operatioanl Procedure	Ketersediaan dokumen	Apakah tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur disetiap Unit kerja?		
302			Apakah Standar Operasional Prosedur yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan?		
303			Berapa Jumlah SOP yang telah disusun dan ditetapkan?		

304				Apa saja kendala dalam penyusunan SOP?		
305			Pelaksanaan	Apakah SOP tersebut telah diimplementasikan?		
306				Apa saja kendala dalam pengimplementasian SOP?		
307				Apakah dilakukan Reviu dan Evaluasi SOP setiap tahun?		
308				Apa dampak SOP yang telah disusun terhadap Peningkatan kinerja?		
309		Monev kelembagaan	Penggunaan aplikasi monev	Apakah satker melaporkan secara berkala capaian output program dan kegiatan melalui aplikasi Monev/SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas secara tepat waktu?		
310				Apa kesulitan/kendala dalam menggunakan aplikasi Monev/SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas?		
311				Apa kendala dalam membuat laporan Monev (capaian output) secara berkala?		
312				Apakah satker memiliki SDM yang bersertifikasi?		
313			Pelaksanaan monev	Apakah KPU secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terkait realisasi capaian output?		
314				Apakah ada tindaklanjut dari hasil evaluasi capaian output pada unit kerja?		
315				berapa unit kerja yang menindaklanjuti hasil evaluasi capaian output?		
316				Bagaimana cara menindaklanjuti hasil evaluasi capaian output?		
317			Nilai Kinerja	Berapa nilai kinerja anggaran KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2022?		

318				Berapa nilai kinerja anggaran KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2023?		
319	Pelaporan kelembagaan	Penyusunan Laporan		Apakah LKjIP disusun tepat waktu ?		
320				Apakah LKjIP disusun sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 ?		
321				Apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan?		
322				Apakah LKjIP telah mendukung dalam penerapan good governance?		
323				Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan?		
324				Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan aplikasi e-SAKIP Reviu?		
325				Apakah penilaian LKjIP mencapai target tahunan yang telah ditetapkan?		
326				Apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi(e-Monev Bappenas dan SMART DJA)?		
327				Apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan?		
328				Review Laporan Keuangan KPU	Apakah Laporan Keuangan setiap Semester dilakukan Reviu oleh Inspektorat Utama KPU?	
329		Prov/Kab/Kota	Apakah Laporan PIPK telah dilakukan Reviu oleh Inspektorat Utama KPU?			
330			Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk Satker KPU Kabupaten/Kota?			

331	Reformasi Birkokrasi	Pelaksanaan Reformasi Birkokrasi	Apakah dampak pelaksanaan RB terhadap organisasi?		
332			Adakah kendala dalam pelaksanaan RB ?		
333			Apakah satker telah membentuk tim Reformasi Birokrasi?		
334			Apakah pembentukan Tim RB membantu mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU?		
335	SOTK	Penerapan SOTK	Apakah SOTK sudah sesuai kebutuhan?		
336			Apakah terdapat duplikasi terhadap tugas dan fungsi dalam struktur organisasi ?		
337			Apakah SOTK telah mewujudkan keberimbangan beban kerja antar unit kerja?		
338			Berapa persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi?		
339			Apakah penyederhanaan struktur organisasi meningkatkan kinerja?		
340			Apa dampak pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi terhadap pelaksanaan tugas?		
341			Apakah evaluasi kelembagaan sudah dilaksanakan berdasarkan pedoman evaluasi kelembagaan sesuai permenpanrb 20/2018?		
342	Pelayanan publik	Evaluasi kinerja Pelayanan publik	Apakah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di KPU ?		
343			Apakah ada Rekomendasi hasil Evaluasi Pelayanan Publik di KPU?		
344			Apakah Rekomendasi sudah ditindaklanjuti?		
345			Berapa Nilai Capaian Indeks Pelayanan Publik KPU? (Skala 1-5)		

346			SKM	Apakah setiap Unit Kerja di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik?		
347				Apakah terdapat Rekomendasi pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)?		
348				Apakah Rekomendasi sudah ditindaklanjuti?		
349				Berapa Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)? (Pertanyaan terbuka)		

## Lampiran 4

### PERNYATAAN KEBENARAN PENGISIAN KUESIONER EVALUASI PEMILU 2024

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :

dengan ini menyatakan bahwa telah mengisi kuesioner Evaluasi Pemilu tahun 2024 dan mengisi dokumen pendukungnya dengan sebenar-benarnya.

....., ..... Agustus 2024

Nama Jelas

Jabatan